



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II  
JL. LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3449230 PSW.5200, (021) 3450959 FAKSIMILI (021) 3457490  
SITUS [www.perbendaharaan.go.id](http://www.perbendaharaan.go.id)

Nomor : S-4193 /PB/2018  
Lampiran : 1 (satu) Buku  
Perihal : Penyampaian Laporan Kajian Fiskal Regional  
Gabungan/Laporan Khatulistiwa Tahun 2017

15 Mei 2018

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah DJPb di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan penyelesaian penyusunan Laporan Khatulistiwa Tahun 2017, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Laporan Khatulistiwa Tahun 2017 merupakan gabungan dari Kajian Fiskal Regional Tahun 2017 yang telah disusun oleh seluruh Kanwil DJPb yang mengulas dinamika perkembangan kebijakan fiskal baik pusat maupun daerah dalam rangka mendorong laju perekonomian dan perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat.
2. Tema Laporan Khatulistiwa Tahun 2017 adalah "*Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah untuk Mencapai Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan sesuai dengan Sasaran Strategis Nasional*". Hal ini sejalan dengan semangat sinkronisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan target-target pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat yang merata di seluruh tanah air.
3. Laporan Khatulistiwa ini dapat diselesaikan lebih cepat 2 (dua) bulan, yakni pada April 2018 dibandingkan dengan laporan tahun 2016 yang diterbitkan pada bulan Juni 2017. Selain itu, Laporan Khatulistiwa Tahun 2017 diharapkan mampu memenuhi ekspektasi arahan Menteri Keuangan agar hasil analisa kajian-kajian yang dilakukan oleh DJPb dapat dipergunakan untuk memperbaiki kualitas rancangan APBN dan APBD.
4. Laporan Khatulistiwa Tahun 2017 pada intinya memuat sebagai berikut:
  - a. Perekonomian Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan perbaikan dibanding tahun 2016 yang diindikasikan dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang relatif stabil. Pertumbuhan positif ini didukung dengan nilai indikator kesejahteraan yang lebih baik dari tahun 2016.

Uraian	2016	2017	Perubahan
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,02%	5,07%	▲
Inflasi	3,02%	3,61%	▲
Persentase Penduduk Miskin	10,70%	10,12%	▼
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,61%	5,50%	▼
Indeks Pembangunan Manusia	70,18	70,81	▲
Rasio Gini	0,394	0,391	▼

- b. Berdasarkan analisis pertumbuhan dan kesejahteraan, maka provinsi-provinsi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu: Kelompok (1) provinsi dengan pertumbuhan tinggi dan kesejahteraan tinggi terdiri dari 8 provinsi, Kelompok (2) provinsi dengan pertumbuhan tinggi dan kesejahteraan sedang-rendah terdiri dari 16 provinsi, Kelompok (3) provinsi dengan pertumbuhan sedang-rendah dan kesejahteraan sedang-rendah terdiri dari 7 provinsi, dan Kelompok (4) provinsi dengan pertumbuhan sedang-rendah namun kesejahteraan tinggi terdiri dari 3 provinsi.



- c. Provinsi pada regional Jawa tetap menjadi kontributor terbesar untuk penerimaan negara karena merupakan pusat pemerintahan, bisnis dan kawasan industri. Selain itu, regional Jawa juga menjadi penerima alokasi terbesar dan merupakan regional yang memiliki surplus arus kas pada tahun 2017.

Regional	Penerimaan		Pengeluaran		Selisih
	Pajak	PNBP	K/L	TKDD	
1. Sumatera	77.299,47	9.629,52	86.284,82	204.254,39	(203.610,22)
2. Jawa	1.185.347,52	290.241,02	1.042.847,59	244.975,51	187.765,44
3. Kalimantan	34.184,09	3.378,52	31.341,82	75.003,68	(68.782,89)
4. Sulawesi	18.735,42	4.118,70	45.609,95	87.456,79	(110.212,62)
5. Bali Nusra	15.184,05	2.558,46	24.678,71	48.280,35	(55.216,55)
6. Maluku Papua	12.779,42	1.307,96	31.320,67	82.021,67	(99.254,96)
<b>Total</b>	<b>1.343.529,83</b>	<b>311.234,18</b>	<b>1.262.083,56</b>	<b>741.992,39</b>	<b>(349.311,80)</b>

Arus Kas APBN Menurut Regional Tahun 2017 Sumber: SPAN, 2018 (diolah)

- d. Kualitas penganggaran dan eksekusi belanja K/L menunjukkan peningkatan yang tercermin dari angka realisasi belanja negara pada tahun 2017 sebesar 93,9% yang jauh lebih baik dibandingkan pada tahun 2016 yaitu sebesar 89,5%.
- e. Kemandirian keuangan daerah tahun 2017 masih menunjukkan angka ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat walaupun dari sisi pertumbuhan PAD menunjukkan peningkatan. Sementara itu, porsi belanja modal yang dibelanjakan terhadap total belanja daerah pada tahun 2017 juga menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2016 porsi rata-rata 25%. Namun demikian, porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah menunjukan performa yang kurang baik dengan indikasi bahwa semakin banyak jumlah provinsi yang memiliki rasio belanja pegawai pada kisaran 40% s.d. 50%.
- f. Kinerja penyaluran DAK Fisik mencapai Rp62,12 triliun atau 89,3% dari total pagu Rp69,53 triliun. Untuk penyerapan DAK Fisik secara Nasional sebesar Rp50,93 triliun atau 87,57% dari dana yang diterima dari RKUN. Rata-rata persentase capaian output DAK Fisik adalah 79,23%. Sementara itu, dari total pagu Dana Desa 2017 sebesar Rp60 triliun telah tersalurkan Rp59,77 triliun atau 99,61% dari pagu Rp60 triliun melalui dua tahapan penyaluran.
- g. Dari berbagai kategori/bidang yang ada dan telah dialokasikan anggarannya baik oleh K/L maupun Pemda melalui DAK Fisik dan Dana Desa, terdapat beberapa kategori/bidang yang dapat dikatakan selaras antara lain pada pembangunan jalan, irigasi, sanitasi, pasar, sentra industri kecil dan menengah, air minum, rumah/permukiman dan kesehatan.
5. Berdasarkan pembahasan di atas, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas indikator kesejahteraan masyarakat, dapat diberikan saran sebagai berikut:
- a. Perlunya peningkatan program-program pemerintah melalui kebijakan fiskal berbasis infrastruktur dan sosial kemasyarakatan terutama untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan peningkatan pendapatan. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan karakteristik dan potensi daerah yang belum sepenuhnya tergali secara optimal.

- b. Pentingnya penguatan koordinasi bersifat strategis dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal-hal sebagai berikut:
- 1) Penciptaan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat dengan mekanisme padat karya dan ketepatan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat.
  - 2) Melakukan reviu dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial dan subsidi.
  - 3) Penggunaan sistem monev yang handal dan dapat memantau setiap perkembangan dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.
  - 4) Sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, serta menghindari tumpang tindih pembiayaan pembangunan.
  - 5) meminimalisir ketimpangan antar-regional yang masih tinggi melalui percepatan pembangunan infrastruktur yang memadai dan pembentukan wadah berbagi pengetahuan atas keberhasilan provinsi dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Evaluasi atas pelaksanaan dana transfer ke daerah dan dana desa harus dilakukan secara akurat oleh pemerintah pusat dalam rangka memberikan perhatian secara maksimal terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah yang masih belum optimal. Selain itu, penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa seharusnya sudah menjadi indikator untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
- d. Alokasi anggaran untuk pengembangan wilayah dilaksanakan dalam rangka mendorong kemandirian fiskal daerah dengan tetap menekankan pada keunggulan kompetitif perekonomian daerah didukung dengan peningkatan kualitas SDM pada regional tersebut, serta mendorong daerah surplus untuk terus meningkatkan kemampuan daerah.
6. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Laporan Khatulistiwa Tahun 2017 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Direktur Jenderal



Marwanto Harjowiryo  
NIP. 195906061983121001



Daftar Penerima Laporan Kajian Fiskal Regional Gabungan/Laporan Khatulistiwa Tahun 2017:

1. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh
2. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau
5. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jambi
6. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan
7. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu
8. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung
9. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau
11. Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
13. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah
14. Kepala Kanwil DJPb Provinsi DI Yogyakarta
15. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur
16. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Banten
17. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali
18. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat
21. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah
22. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan
23. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur
24. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara
25. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara
26. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah
27. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan
28. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara
29. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo
30. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat
31. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku
32. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
33. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua
34. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat